

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerimaan negara memegang peranan yang sangat penting dalam meningkatkan pembangunan nasional dan memiliki kedudukan strategis. Karena tidak mungkin untuk selalu berharap bantuan luar negeri untuk menggerakkan pemerintahan dan pembangunan negara tanpa sumber pendapatan domestik untuk membiayai pembangunan nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah membutuhkan beberapa jenis potensi di Indonesia. Sektor pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dalam negeri untuk kepentingan pembangunan nasional.

Salah satu upaya untuk mencapai kemandirian bangsa dan negara dalam membiayai pembangunan adalah dengan menggali sumber-sumber pendanaan dari dalam negeri sendiri. Untuk membiayai pembangunan, negara menerima pendapatan rutin dan tidak terjadwal dari pajak, bea masuk, materai, iuran, sumbangan, pinjaman dari dalam dan luar negeri serta pungutan lainnya. Dari sekian banyak penerimaan yang dihasilkan, sektor pajak merupakan salah satu penerimaan pemerintah yang sangat besar.

Pajak merupakan salah satu alternatif pendapatan pemerintah yang diharapkan tidak hanya menggantikan peran sektor migas dan industri, tetapi juga mengurangi ketergantungan terhadap kredit luar negeri. Diharapkan Indonesia dapat mengandalkan pendapatan dalam negeri untuk lebih mandiri dalam menjalankan pemerintahan.

Salah satu bentuk pajak adalah pajak penghasilan, atau disingkat PPh. Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat (1) Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh atau diperoleh

Wajib Pajak baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia dan digunakan untuk mengkonsumsi atau menambah harta kekayaan Wajib Pajak.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) tahun 2013, pajak sangat berperan untuk sumber pembiayaan. Sumber pajak dalam negeri terbesar diproyeksikan berasal dari pajak penghasilan non-migas yang termasuk di dalamnya adalah Pajak Penghasilan pasal 21. Menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 21 bahwa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan (Mujiyati dan Aris, 2010: 54).

PPh pasal 21 merupakan pajak yang terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban Wajib Pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud adalah berupa gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana telah diatur dalam pasal 21. UU nomor 7 tahun 2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU nomor 36 tahun 2008. Pada dasarnya pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak.

Pemotongan pajak pada sumbernya adalah cara paling efisien untuk menghasilkan pendapatan pemerintah. Dengan pemotongan yang relatif dan diatur secara administratif, pendapatan langsung dapat dihasilkan yang mencakup ukuran wajib pajak orang pribadi dan sosialisasi kewajiban perpajakan kepada publik. Pemberi kerja juga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghitung, menahan, membayar dan mengungkapkan jumlah

pajak yang harus dipotong dan disetorkan atas penghasilan yang dihasilkan ketika gaji ditarik.

Subjek pajak PPh 21 adalah pegawai atau karyawan. Pegawai adalah setiap orang pribadi yang melakukan pekerjaan berdasarkan suatu perjanjian kerja baik tertulis maupun tidak tertulis. Pegawai terdiri dari pegawai tetap, pegawai lepas, penerima honorarium, penerima upah, dan orang pribadi lainnya yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan dari pemotong pajak.

PT Batanghari Barisan merupakan perusahaan *crumb rubber* yang menghasilkan karet sebagai bahan baku untuk pabrik ban. Perusahaan ini didirikan sesuai dengan akte notaris no. 2 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dalam surat keputusan No. 02-471-HT-01-01 pada tanggal 29 Januari 1985. PT. Batanghari Barisan sebagai objek penelitian membayar pajak setiap periode pada waktu yang ditentukan. Penelitian ini berfokus pada perhitungan PPh pasal 21 bagi pegawai tetap pada PT. Batanghari Barisan dipotong dari gaji pegawai tetap setiap bulannya berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008.

Berdasarkan rumusan yang dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) Pasal 21 TERHADAP PEGAWAI TETAP PT. BATANGHARI BARISAN.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak penghasilan (PPh 21) pada PT. BATANGHARI BARISAN?

1.3 Tujuan Magang

Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui tentang proses perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak penghasilan (PPh 21) pada PT. BATANGHARI BARISAN.

1.4 Manfaat Magang

Manfaat yang ingin diberikan melalui pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

- a) Sebagai sarana untuk latihan dan membandingkan antara ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dengan penerapan yang dilakukan pada PT. BATANGHARI BARISAN
- b) Merasakan situasi dan kondisi dunia kerja yang sesungguhnya.
- c) Meningkatkan kreatifitas dan mengembangkan keterampilan dalam dunia kerja.
- d) Meningkatkan kemampuan dalam berorganisasi dan bersosialisasi dalam lingkungan magang dan lingkungan kerja.

2. Bagi Perusahaan

- a) Sebagai bahan evaluasi bagi PT. BATANGHARI BARISAN atas keputusan yang telah dibuat pada masa lalu dan sebagai pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang akan diambil dimasa yang akan datang.
- b) Sebagai sarana untuk menjembatani perusahaan untuk bekerjasama dengan lembaga pendidikan dalam bidang akademis maupun non akademis.

3. Bagi Universitas



- a) Untuk meningkatkan kemitraan dengan perusahaan tempat magang
- b) Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian profesional dengan tingkat pengetahuan, keterampilan, serta etos kerja yang sesuai dengan tuntutan di lapangan kerja.

1.5 Metode Penelitian

1. Studi Keperpustakaan

Dalam Pengumpulan dengan Metode Studi Keperpustakaan ini, maka langkah pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan data sebanyak mungkin. Referensi ini meliputi buku-buku, teks, maupun berita dari internet.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian Ini dilakukan secara langsung oleh penulis pada Perusahaan yang menjadi objek studi sehingga dapat diperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan laporan kerja praktek. Adapun Teknik penelitian yang dilakukan:

- Mengadakan observasi atau pengamatan langsung terhadap operasi Perusahaan yang bersangkutan
- Mengadakan wawancara dengan Pegawai Perusahaan
- Pengambilan data tertulis dari Perusahaan

3. Metode Analisis Data

Setelah Data-data Terkumpul, selanjutnya Penulis Menganalisis data - data tersebut dengan menggunakan teori anggaran perusahaan.

1.6 Tempat dan Waktu Magang

Dalam hal ini penulis melakukan kegiatan magang yang bertempat di Jl. Padang Bypass, Kel. Batuang taba nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat 25223. Dimana waktu kegiatan magang dilaksanakan selama 40 (empat puluh) hari masa kerja

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam Sistematika penulisan ini terdapat 5 bab mengenai hal-hal berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas beberapa unsur, yaitu latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, tempat dan waktu magang, dan sistematika penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

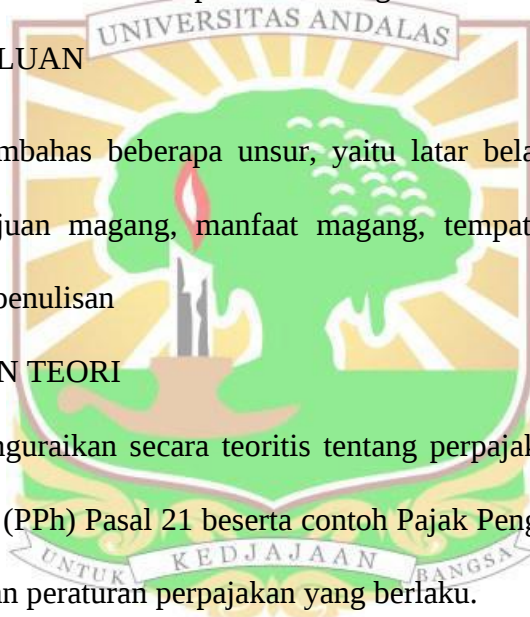
Bab ini menguraikan secara teoritis tentang perpajakan secara umum dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 beserta contoh Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

BAB III GAMBARAN UMUM

Gambaran umum dari perusahaan ini berisi tentang sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab dan kegiatan perusahaan.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab pembahasan berisikan deskripsi hasil penelitian yang meliputi uraian masalah, analisis masalah, pemecahan masalah serta pembahasan tentang analisis penyusunan anggaran penjualan.



BAB V PENUTUP

Bab penutup berisikan tentang kesimpulan dari permasalahan yang sudah dibahas serta saran-saran bagi perusahaan yang bersifat membangun tentang analisis perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak penghasilan (PPh 21) Terhadap pegawai tetap PT. Batanghari Barisan.

